

# PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI PADA MASA KINI

Sirojul Munir

Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Darul 'Ulum Lamongan

[Sirojulmunir.2022@mhs.unisda.ac.id](mailto:Sirojulmunir.2022@mhs.unisda.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana standar moneter yang ada di Indonesia. Standar moneter adalah aturan hukum yang mengatur praktik dan kebiasaan yang mendasari penggunaan uang dalam suatu sistem ekonomi. Ada beberapa jenis standar moneter, seperti standar barang, standar kembar, dan standar kepercayaan (kertas). Standar moneter yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah standar uang kertas, yang mengacu pada peraturan dan kebijakan yang mengatur penggunaan uang dan kebijakan moneter. Bank Indonesia, bank sentral Indonesia, bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneter. Indonesia memiliki sistem moneter syariah, yang didasarkan pada hukum Islam. Mata uang syariah tidak menggunakan suku bunga. Metode yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah penelitian kualitatif dan melibatkan studi literatur atau penelusuran literatur dengan menggunakan jurnal atau karya ilmiah sebagai sumber utama.

**Kata Kunci : islam,bank,pasar**

## ABSTRAC

*The purpose of this scientific research is to find out how monetary standards exist in Indonesia. Monetary standards are the legal rules that govern the practices and customs underlying the use of money in an economic system. There are several types of monetary standards, such as goods standard, twin standard, and trust (paper) standard. The monetary standard currently applied in Indonesia is the paper money standard, which refers to the regulations and policies that govern the use of money and monetary policy. Bank Indonesia, Indonesia's central bank, is responsible for formulating and implementing monetary policy. Indonesia has a sharia monetary system, which is based on Islamic law. Sharia currency does not use interest rates. The method used to write this article is qualitative research and involves a literature study or literature search using journals or scientific works as the main source.*

**Keyword :Islamic,bank,market**

## Pendahuluan

Sistem moneter adalah sistem moneter yang didasarkan pada standar nilai uang, termasuk peraturan tentang karakteristik uang, peraturan tentang jumlah uang (baik logam maupun kertas) yang beredar, impor dan ekspor logam mulia, dan fasilitas perbankan yang terkait dengan giro (simpanan yang dapat ditarik kapan saja).

Jadi, ketika kita berbicara tentang masalah moneter, masalah utama yang kita bicarakan adalah masalah moneter: setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, dan mata uang tersebut mewakili nilai barangnya. Demikian pula, sistem moneter internasional adalah institusi yang

digunakan untuk melakukan pembayaran untuk transaksi antar negara. Sistem ini menentukan bagaimana nilai tukar ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhinya.

Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional dan membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan. Elemen kunci dari sistem moneter internasional adalah perjanjian rezim nilai tukar yang terjadi antara negara-negara di seluruh dunia.

Sebuah negara akan berusaha menjaga unit moneternya pada nilai komoditas yang konstan. Komoditas apa pun dapat dipilih sebagai unit moneter. Dengan demikian, standar moneter adalah kombinasi hukum, praktik, dan kebiasaan yang mendasari penggunaan uang dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar berbagai negara di dunia termasuk penyesuaian untuk arus modal, perdagangan, dan neraca pembayaran.<sup>1</sup>

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini dengan metode kualitatif yang menggunakan library sesearch (studi kepustakaan). Sudi kepustakaan adalah dengan mengutip beberapa literature seperti buku, catatan atau laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Metode library research yang digunakan dalam penelitian ini, dengan mengutip keterangan atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, internet, surat kabar, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya.<sup>2</sup>

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu atau topik tertentu secara mendalam serta memahami fenomena sosial yang terjadi di dalamnya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa langkah awal sepertimenentukan topik penelitian dan menemukan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik tersebut. Setelah itu, peneliti membaca dan mencermati setiap informasi yang ada pada literatur tersebut serta menyusun sebuah kerangka konsep berdasarkan temuan-temuan penting dari bahan pustaka.

Selanjutnya, peneliti mengolah data-data tersebut menjadi analisis deskriptif atau interpretatif sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang isu atau fenomena sosial yang sedang ditelaah. Hasil akhir dari analisis biasanya disajikan dalam bentuk makalah ilmiah ataupun laporan hasil penelitian. Jenis penelitian ini juga relatif mudah dilakukan karena tidak memerlukan biaya tinggi seperti halnya jika harus melakukan survei langsung ke lapangan

## **Pembahasan**

### **Kebijakan moneter Bank Sentral**

---

<sup>1</sup> M Hilda, R Ayunda, and V Auliyah, "Standar Moneter Di Indonesia," *Academia.Edu* 01, no. 01 (2023): 1–15,

<sup>2</sup> Misbahuddin dan Hasan. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi Ke-2. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

rupiah untuk barang dan jasa yang tercermin dari tingkat inflasi dan stabilitas rupiah untuk mata uang negara lain yang tercermin dari perkembangan nilai tukar perbandingan.<sup>5</sup> Pengendalian jumlah uang yang Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh otoritas keuangan (dalam hal ini bank sentral) untuk mengelola variabel keuangan seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga, dan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis dan input berbasis aspek inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan internasional, dll. dan faktor faktor lain<sup>3</sup>

Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang direvisi beberapa kali oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU Perbankan Indonesia), dan Pasal 7 tercapai. , Menstabilkan nilai Rupiah. Stabilitas rupiah meliputi dua aspek yaitu stabilitas beredar akan mempengaruhi laju inflasi yang bertujuan mengontrol stabilitas ekonomi, harga, jumlah neraca pembayaran maupun pembukaan lapangan pekerjaan baru. Secara makro kebijakan moneter ini akan dominan di rasakan dampaknya oleh perbankan hingga sektor riil<sup>4</sup>.

Tingkat suku bunga mempengaruhi hampir seluruh permintaan barang dan jasa serta investasi, efeknya akan sangat besar dalam menstimulasi ataupun menurunkan aktivitas perekonomian.<sup>6</sup> Stabilitas ekonomi merupakan suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Kebijakan moneter dapat di ambil ketika terjadi ketidakstabilan tingkat harga. Ketidak stabilan ini terjadi ketika jumlah uang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang. Tingkat kenaikan harga fluktuatif tidak beraturan sehingga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam kasus lain, keseimbangan antara jumlah uang dan jumlah barang dan jasa mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor riil. Investasi ini menyerap lapangan kerja baru dan kehadiran lapangan kerja tersebut berarti menciptakan lapangan kerja<sup>5</sup>.

### **Sistem Moneter Menurut Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem moneter berfokus pada penggunaan uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tidak sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dalam semua transaksi keuangan, termasuk pemberian kredit dan pinjaman. Sistem moneter Islam menekankan pada penggunaan uang untuk memfasilitasi transaksi riil, bukan untuk spekulasi. Selain itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa) untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem

---

<sup>3</sup> Saiful Maqrobi dan Amin P, Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Uji Kausalitas Inflation and Economic Growth: Testing for Causality, Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan, vol 3 no 1 Mei 2011

<sup>4</sup> Frederick Mishkin, Ekonomi Uang Perbankan and Financial Market (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.89

<sup>5</sup> Miftakhul Huda, "Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studil Lmu Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 2721–7078.

keuangan inilah yang paling banyak di lakukan studi empiris maupun historis bila di bandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. sistem keuangan pada zaman Rasulullah saw. di gunakan bimatalic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah saw. ini relatif stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10, namun demikian, setabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Misalkan pada masa Bani Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar-dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah.

Pada masa yang lain nilai tukar dirham-dinar mengalami fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35-1:50. Instabilitas dalam nilai tukar yang ini akan mengakibatkan terjadinya bad coins out of circulations atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, dalam literatur konvensional peristiwa ini di sebut hukum Gresham. Seperi yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328), dimana mata uang yang beredar tersebut dari fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak . oleh Ibnu Taimiyah di katakana bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu:

1. *The gold cins standard: di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran*
2. *The gold bullion standard: di mana logam emas sebagai para meter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.*
3. *The gold exchange standard(bretton woods system): di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di back-up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier (kredit money) yaitu uang yang keberadaannya tidak ditopang oleh emas dan perak<sup>6</sup>.*

Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui bank sentral. Untuk mengarahkan dan mengendalikan perekonomian di suatu Negara ke arah atau konsini yang ingin di capai. Kebijakan moneter pada ekonomi islam hanya sebagai pelengkap untuk sektor riil. Pada ekonomi islam tidak mengakui adanya instrumen bunga dalam kegiatan perekonomian karena hal itu jelas di dalam al-Quran bahwa bunga bank adalah riba. Pelarangan riba ini bermaksud agar hubungan mitra kerja antara pemilik modal dan usaha berlaku adil. Adapun alat kebijakan moneter dalam ekonomi syariah yaitu hukum Syariah. Implementasi dari semua instrumen kebijakan moneter konvensional dan barang berharga juga mengandung komponen bunga dan riba. Oleh sebab itu, instrumen konvensional yang memasukkan suku bunga dan riba tidak dapat dipakai untuk menerapkan kebijakan moneter yang berbasis syariah.

Kebijakan ekonomi yang ada menurut perspektif islam adalah kebijakan yang harus lebih manusiawi dalam hal menciptakan keadilan sosial, baik itu secara statis maupun secara

---

<sup>6</sup> Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kebijakan Moneter Syariah," Al-Buhuts13, no. 1 (2017): 104–17,

dinamis. Pada setiap kegiatan ekonomi islam yang pada umumnya akan di pegang oleh pihak pemerintah akan tetapi kegiatan-kegiatan ekonominya akan berazaskan islam. Kebijakan ekonomi sebenarnya mengandung makna bahwa pemanfaatan alat alat yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan. Sebenarnya kebijakan ekonomi ini telah lama diterapkan pada setiap kegiatan perekonomian yaitu sejak zaman Rasulullah SAW sistem kebijakan ekonomi yang berbasis islam ini telah di praktekkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya yang tidak memberlakukan uang atau bunga.

Salah satu ciri sistem moneter Islam adalah tidak adanya instrument suku bunga. Merujuk pada apa yang telah dipraktikkan pemerintah Islam pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin, saat itu perekonomian yang berlaku adalah perekonomian dagang. Saat para pedagang mengekspor dagangannya maka secara tidak langsung juga mengimpor dinar atau dirham. Begitu juga ketika mengimpor komoditi tertentu mereka juga pada saat yang sama mengekspor dinar atau dirham. Apa yang dilakukan oleh para pedagang tersebut telah menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran uang dari keseimbangan pasar barang dan jasa<sup>7</sup>

### **Sitem Keuangan Islam**

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah:

1. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
3. Al-Qur"an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
4. Sistem keuangan Islam adalah system keuangan yang universal.
5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan Negara.
7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.
8. Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan
9. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.<sup>8</sup>

Keuangan adalah senjata politik, social, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena sumber-sumber lembaga keuangan berasal dari deposit yang diletakkan oleh bagian yang representative mewakili seluruh penduduk, cukup

---

<sup>7</sup> Muhammad Yazid, "Model Kebijakan Moneter Islam Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi," *Jurnal Keislaman*.vol 08, no. 01 (2025): 243–55.

<sup>8</sup> MuhArafah,Sistem Keuangan Islam, Journal Of Islamic Economic and Business,Vol 1

rasional kalau ia juga dianggap sebagai sumber nasional. Seluruhnya harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Namun karena sumber-sumber keuangan itu sangat langka maka perlu digunakan dengan keadilan dan efisiensi yang optimal.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktifitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang.<sup>9</sup>

### **Karakteristik Sistem Keuangan Islam**

Akar dari keuangan Islam (Islamic Finance) adalah Qur'an dan Hadist. Didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, maka dalam penerapan sistem keuangan, Islam memiliki komitmen tinggi untuk kegiatan ekonomi yang adil dan harmonis. Meskipun sistem keuangan Islam hampir mirip dengan sistem keuangan konvensional, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karakteristik utama sistem keuangan dan perbankan Islam

menurut Chapra mempunyai fungsi dan tujuan yaitu:

1. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh serta laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
2. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan/pendapatan yang merata.
3. Stabilitas nilai mata uang sehingga memungkinkan uang sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, mempunyai standar yang baik serta alat penyimpan yang stabil.
4. Mobilisasi tabungan dan investasi untuk pembangunan ekonomi yang adil.
5. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara normal.<sup>10</sup>

### **Kebijakan Moneter Di Indonesia**

Aktivitas ekonomi dan keuangan suatu negara dipengaruhi oleh peran kebijakan moneter bank sentral. Kebijakan tersebut ditujukan untuk stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, seperti perputaran uang dalam perekonomian; perkembangan peredaran uang; suku bunga; nilai tukar dan lain-lain (Warjoyo, 2004). Sedangkan di Indonesia, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah dengan undang-undang nomor. 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia (BI) adalah mencapai hal-hal sebagai berikut: Menjaga kestabilan nilai rupiah, kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah.

Secara praktis, kebijakan moneter setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu:

1. Perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan pelaku ekonomi;
2. waktu yang diperlukan untuk mencapai sasaran inflasi (lag);

---

<sup>9</sup> ShintaDewianty, Sistem Lembaga Keuangan Syariah, ISSN: 2088-6365, Vol 2, No 1

<sup>10</sup> Khaidar Jamilah, "Buku Daras Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam," *Buku Daras Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam*, 2021.

3. Perubahan arus pengiriman uang sesuai dengan perkembangan perekonomian dan keuangan negara.

Oleh karena itu, perbankan harus merespon perubahan perilaku bank sentral dan sektor keuangan harus mengantisipasi perubahan perilaku ini. Jangka waktu yang diperlukan tergantung pada kompleksitas produk keuangan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan moneter. Perubahan arus yang digunakan dalam perekonomian terbuka menyebabkan kondisi moneter dan keuangan yang negatif saling mempengaruhi. Kompleksitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia setidaknya dapat dijabarkan melalui dua cara, yakni: cara pertama melalui interaksi yang terjadi di pasar keuangan atau interaksi antara Bank Sentral dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam kegiatan keuangan; cara kedua melalui interaksi terkait fungsi intermediasi yaitu interaksi antara bank dengan lembaga keuangan lain dan pelaku ekonomi dalam berbagai kegiatan ekonomi di sektor riil. Beberapa saluran yang menjadi dasar kebijakan moneter adalah uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi.<sup>11</sup>

### **Operasi Pasar Terbuka**

Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (government security)(Arief, 1996). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan moneter merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Dalam kebijakan moneter, kesejahteraan dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keseimbangan harga, dan neraca pembayaran yang tercermin dalam pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter tersebut, bank sentral mempertimbangkan dua tujuan: tujuan akhir, yang biasanya ditujukan untuk mencapai stabilitas harga dan/atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Perkembangan ekonomi suatu negara dari tertutup menjadi terbuka yang memaksa mereka untuk meninggalkan instrumen kebijakan moneter langsung dan memilih instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Di Indonesia, instrumen kebijakan langsung mulai terasa tidak efektif pada awal tahun 1980an, setelah itu kebijakan beralih ke kebijakan moneter tidak langsung. Salah satu kebijakan moneter tidak langsung yang digunakan adalah operasi pasar terbuka (OPT) yang bercirikan jalan keluar. Kebijakan deregulasi keuangan dan perbankan pada tahun 1983. Secara umum OPT diartikan sebagai pembelian atau penjualan surat berharga oleh bank sentral baik di pasar primer maupun sekunder dengan tujuan untuk mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang, seperti treasury bills T-Bills, surat berharga bank sentral (central bank bills) dan surat berharga swasta (prime commercial papers). Operasi pasar terbuka adalah alat kebijakan yang umum digunakan. Sebab, instrumen ini merupakan partisipasi otoritas moneter yang berorientasi pasar. Bank dan broker tidak mengikat, arah politik dapat dengan mudah diambil oleh pasar dan tidak membebani bank.

---

<sup>11</sup> Kaila Zulfa Khoirurrizki et al., "Perkembangan Ekonomi Di Indonesia Melalui Kebijakan Moneter Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 136–45, <https://doi.org/10.59024/jjise.v2i1.555>.

Selain itu, untuk mempengaruhi kondisi likuiditas pasar uang terdapat langkah-langkah kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral dapat menyebabkan kontraksi atau perluasan kebijakan moneter. Dalam kondisi kontraksi, BI menjual SBI dan untuk ekspansi, BI membeli kembali SBI (SBI Repo). Dengan kata lain, jika menyangkut likuiditas perbankan maka akan mengalami surplus kemudian BI akan menjual surat berharga. Sebaliknya, jika permintaan uang mengalami surplus maka BI akan membeli surat berharga tersebut. Jual beli surat berharga berarti beban yang harus ditanggung. Jika BI menjual SBI maka beban OPT ditanggung BI, sedangkan jika OPT menggunakan intervensi valuta asing maka tergantung manajemen baik BI maupun pemerintah.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mencapai puncaknya pada tahun 2007 sebesar 245,328 miliar rupiah, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mencapai puncaknya pada tahun 2009 sebesar 4,341 miliar rupiah. Sedangkan FASBIS mencatatkan kenaikan tertinggi yaitu mencapai 460 persen dalam periode tersebut. 4 tahun, 3,386 miliar rupiah pada tahun 2009 menjadi 15,582 miliar rupiah pada tahun 2012. Sementara itu, fluktuasi dan pertumbuhan eksponensial setiap instrumen yang dilakukan BI menunjukkan adanya upaya kontraksi dan ekspansi dalam mengatur jumlah uang beredar yang beredar.<sup>12</sup>

### **Peran Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian di Indonesia Menurut Pandangan Islam**

Salah satu komponen stabilitas nasional dan tujuan pembangunan nasional adalah mempertahankan stabilitas moneter. Kebijakan moneter yang stabil sangat memengaruhi aktivitas ekonomi. Untuk menciptakan kondisi perekonomian yang harmonis, bank sentral harus memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas moneter. Jika dibandingkan dengan negara maju, kebijakan moneter memiliki peran yang lebih besar di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk mencapai tingkat stabilitas yang lebih baik dalam jumlah uang beredar, sangatlah penting untuk menerapkan pendekatan yang cermat terhadap belanja domestik dan perdagangan internasional. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, seimbang secara harmonis. Perbankan di Indonesia memainkan peran penting dalam proses ini dengan menerapkan kebijakan moneter makroprudensial melalui pemanfaatan instrumen yang tersedia.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mengawasi dan mempengaruhi stabilitas, aktivitas, dan pertumbuhan perekonomian. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, dan selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga laju inflasi dengan menjaga kestabilan nilai rupiah yang pada akhirnya mempengaruhi harga barang dan jasa. Sejak Juli 2005, Bank Indonesia telah menerapkan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakannya. ITF dirancang khusus untuk mencapai target inflasi di masa depan, yang dipublikasikan untuk menunjukkan komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Sebagai otoritas dan lembaga moneter yang bertugas menstabilkan sistem keuangan, Bank Indonesia berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi dan nilai-nilai keuangan

---

<sup>12</sup> Kaila Zulfa Khoirurrizki et al.

syariah dalam menjalankan operasionalnya dan mendorong pembangunan ekonomi melalui keuangan syariah.<sup>13</sup>

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Sistem moneter adalah sistem moneter yang didasarkan pada standar nilai uang, termasuk peraturan tentang karakteristik uang, peraturan tentang jumlah uang (baik logam maupun kertas) yang beredar, impor dan ekspor logam mulia, dan fasilitas perbankan yang terkait dengan giro (simpanan yang dapat ditarik kapan saja).

Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter yang direvisi beberapa kali oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (UU Perbankan Indonesia), dan Pasal 7 tercapai. , Menstabilkan nilai Rupiah. Stabilitas rupiah meliputi dua aspek yaitu stabilitas beredar akan mempengaruhi laju inflasi yang bertujuan mengontrol stabilitas ekonomi, harga, jumlah neraca pembayaran maupun pembukaan lapangan pekerjaan baru. Secara makro kebijakan moneter ini akan dominan di rasakan dampaknya oleh perbankan hingga sektor riil.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem moneter berfokus pada penggunaan uang sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, tidak sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi Islam melarang riba (bunga) dalam semua transaksi keuangan, termasuk pemberian kredit dan pinjaman. Sistem moneter Islam menekankan pada penggunaan uang untuk memfasilitasi transaksi riil, bukan untuk spekulasi. Selain itu, ekonomi Islam mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa) untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak di lakukan studi empiris maupun historis bila di bandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya.

## **Daftar Pustaka**

Frederick Mishkin, *Ekonomi Uang Perbankan and Financial Market* (Jakarta: Salemba Empat, 2009)

Khaidar Jamilah, "Buku Daras Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam," *Buku Daras Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam*, 2021.

Kaila Zulfa Khoirurrizki et al., "Perkembangan Ekonomi Di Indonesia Melalui Kebijakan Moneter Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 1 (2024)

Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kebijakan Moneter Syariah," *Al-Buhuts* 13, no. 1 (2017)

---

<sup>13</sup> Yolanda Britania et al., "Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam," *Media Mahardhika* 22, no. 3 (2024): 417–28, <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v22i3.932>.

- M Hilda, R Ayunda, and V Auliyah, "Standar Moneter Di Indonesia," *Academia.Edu* 01, no. 01 (2023)
- Misbahuddin dan Hasan. 2013. Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi Ke-2. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Saiful Maqrobi dan Amin P, Inflasi dan pertumbuhan ekonomi: Uji Kausalitas Inflation and Economic Growth: Testing for Causality, *Jurnal Dinamika dan Keuangan Perbankan*, vol 3 no 1 Mei 2011
- Miftakhul Huda, "Peran Bank Sentral Dalam Kebijakan Moneter Islam," *SALIMIYA: Jurnal Studi Lmu Keagamaan Islam*
- Muhammad Yazid, "Model Kebijakan Moneter Islam Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi," *Jurnal Keislaman*.vol 08, no. 01 (2025)
- MuhArafah, Sistem Keuangan Islam, *Journal Of Islamic Economic and Business*, Vol 1
- ShintaDewianty, Sistem Lembaga Keuangan Syariah, ISSN: 2088-6365, Vol 2, No 1
- Yolanda Britania et al., "Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam," *Media Mahardhika* 22, no. 3 (2024)